

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ciwalen terdapat enam pokok penting yaitu:

a. **Pelibatan Masyarakat**

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat menciptakan rasa memiliki keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan masyarakat desa Ciwalen selalu diikutsertakan.

b. **Keterbukaan**

Setiap hasil dari musyawarah akan disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah dana dicairkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan TPK harus membuat surat sosialisasi dan pemberitahuan kepada BPD perihal akan dimulainya pelaksanaan kegiatan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Sosialisasi kegiatan juga dilakukan dalam bentuk ajakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan proses pencairan Dana Desa. Proses pencairan dimulai dari permintaan surat rekomendasi oleh pemerintah Desa kepada Kecamatan dengan memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya desa dapat mencairkan dana dengan mengirim semua persyaratan ke BPKAD dan DPMD.

d. Realisasi Pelaksanaan

Dalam sektor pembangunan, pemerintah desa lebih banyak menggunakan dananya untuk pembuatan TPT (Tembok Penahan Tanah), hal ini sesuai dengan pernyataan awal keadaan geografis desa ciwalen sendiri yang menjadi salah satu alasan diutamakannya pembuatan TPT. Desa Ciwalen juga sudah memiliki BUMDes yang bergerak dibidang PPOB. Sementara kegiatan pemberdayaan lebih difokuskan pada penanggulangan isu *stunting* dengan berbagai macam kegiatan pemberdayaan dan pembekalan mengenai kesehatan dan gizi.

e. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengelola dana desa, Pemerintah Desa juga wajib memberikan laporan kepada pemberi amanat yaitu masyarakat dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu pemerintah desa membuat 2 laporan yakni Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Untuk mendukung jalannya proses pelaporan, pemerintah pusat menyediakan aplikasi pendukung

bernama SISKEUDES. Laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Ciwalen dapat dikatakan valid apabila dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai dengan yang digunakan dalam kegiatan.

f. Pengawasan

Kegiatan pengawasan pertama kali dilakukan oleh masyarakat dan BPD sebagai perwakilan aspirasi masyarakat. Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh kecamatan sebagai panjang tangan dari kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi atau yang sering disebut monev. Selain pihak Kecamatan ada beberapa instansi yang melakukan monev terhadap pelaksanaan dana desa. Instansi tersebut adalah inspektorat daerah (ITDA), BPKD, Dinas TARKIM, dan dinas terkait lainnya.

2. Pemerintah desa Ciwalen telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pada proses perencanaan unsur-unsur masyarakat diikut sertakan. Saat pelaksanaan, prioritas kegiatan sudah sesuai dengan PERMENDES PD TT No. 19 tahun 2017. Pertanggungjawaban yang dilaksanakan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 46 tahun 2016.

Prinsip Transparansi juga sudah diterapkan hal ini dilihat dari hasil perencanaan yang dibuat melalui rangkaian musyawarah disosialisasikan kepada masyarakat melalui tokoh dan unsur-unsur masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, semua kegiatan sudah cukup transparan dengan dibuat *banner* kegiatan yang berisi rincian informasi kegiatan. Untuk pertanggungjawaban

juga cukup transparansi dengan dibuatnya LPPJ yang merupakan bentuk laporan pemerintah desa kepada BPD sebagai wakil masyarakat.

Prinsip partisipatif juga sudah diterapkan dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, masyarakat diikut sertakan dalam serangkaian musyawarah perencanaan. Untuk tahap pelaksanaan, masyarakat dilibatkan secara langsung pada setiap pelaksanaan kegiatan. Juga pada tahap pertanggungjawaban, masyarakat dilibatkan untuk merawat segala fasilitas yang telah disediakan.

3. Kendala ditemukan pada pengelolaan dana desa di Desa Ciwalen adalah pencairan dana, pelaporan secara online, sistem informasi desa yang belum berjalan dengan baik dan kendala tak terduga seperti kenaikan harga bahan baku yang tinggi, cuaca buruk, dan kendala lainnya.

## **B. Implikasi Penelitian**

Implikasi dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Secara teoritis penerapan tata kelola publik berpengaruh terhadap baik buruknya pengelolaan dana desa. Tata kelola publik memiliki tiga prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Prinsip dalam tata kelola publik ini dapat menuntun pengelolaan dana desa berjalan dengan tertib sesuai aturan. Prinsip akuntabilitas menuntut pengelolaan dana desa untuk sesuai dengan aturan yang berlaku serta bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Prinsip transparansi membuat pemerintah desa terbuka dalam pengelolaan dana desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah desa. Prinsip partisipasi membuat pengelola dana desa lebih responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepedulian dan dukungan masyarakat dalam pembangunan desa.

## 2. Implikasi Praktis

Secara praktis implikasi penelitian ini adalah sebagai masukan kepada aparat desa untuk meningkatkan tata kelola publik dalam pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip dalam tata kelola publik dapat meningkatkan kualitas pemerintah desa sebagai pengelola dana desa.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Dalam proses penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian, berikut ini adalah keterbatasan penelitian tersebut:

1. Penelitian ini dilakukan hanya dalam waktu dua bulan sehingga tidak semua proses pengelolaan dana desa bisa diteliti dengan observasi langsung.
2. Objek penelitian ini hanya menggunakan sampel dari satu desa sehingga tidak ada objek pembandingan pada penelitian ini.
3. Kurangnya informan pada wawancara, khususnya dari pihak masyarakat.

### **D. Saran**

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Saran bagi Pemerintah Desa
  - a. Lebih aktif dalam mengajak masyarakat berpartisipasi pada kegiatan. Beri pemahaman lebih tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk menjadi desa mandiri.
  - b. Maksimalkan sarana informasi berbasis website untuk memaksimalkan SID melalui internet. Karena melalui internetlah mayoritas informasi diserap oleh masyarakat.
2. Saran bagi Dinas BPKP
  - a. Tingkatkan kualitas kegiatan pelatihan operator SISKEUDES. Karena pada kenyataannya di lapangan, masih banyak operator SISKEUDES yang belum menguasai sistem kerja SISKEUDES.
  - b. Perbaharui SISKEUDES untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada sistem, seperti pencetakan kwitansi yang terpusat pada satu kategori. Karena terkadang kwitansi dibutuhkan dicetak terpisah, tidak semua bukti pembelian dibutuhkan dalam satu kwitansi.
3. Saran Bagi Peneliti selanjutnya
  - a. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian dalam waktu yang lebih lama. Agar semua proses pengelolaan dana desa bisa dikaji dari awal perencanaan hingga akhir pertanggungjawaban secara rinci baik melalui wawancara, dokumen, juga observasi langsung.

- b. Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk memilih lebih dari satu desa sebagai objek penelitian agar ada objek pembanding dalam penelitian selanjutnya.
- c. Perbanyak narasumber wawancara, jangan hanya fokus pada lembaga eksekutif desa saja. BPD sebagai lembaga legislatif dan masyarakat sebagai penerima manfaat juga penting untuk dijadikan narasumber.